



Rasionalitas Komunikasi Sebagai Pilihan Gereja Dalam Melawan Politik Uang Di Toraja

Jery Parimba

Pascasarjana, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja

jparimba@gmail.com

Abstract: *Leaders in Toraja society have drawn in understanding of power, recognition, prestige and dignity. This has an impact on the strong incentive of many Toraja people to change their fate by becoming leaders in any way. The result is that they are eager to go abroad and collect as much money as possible and then come back relying on the power of money to seize positions as leaders. Democracy which provides equal opportunities for all people to vote and be elected has been patterned on a transactional politics, namely money politics. This situation certainly threatens and will destroy the building of our democracy. The church, as a very influential part in safeguarding democracy and the succession process of leaders in Toraja society, seems helpless. The power of capital has conquered society, including the church. Is there no other way the church can take? This research was conducted to offer the concept of rationality of Jurgen Habermas's communication. That massive and systematic money politics can be opposed by the church with the concept of massive and systematic communication rationality as well.*

Keywords: *leader, church, money politics, communication rationality*

Abstrak: Pemimpin dalam masyarakat Toraja telah ditarik dalam pemahaman kekuasaan, pengakuan, prestise dan harga diri. Hal ini berdampak kepada kuatnya daya dorong banyak orang Toraja untuk mengubah nasibnya dengan menjadi pemimpin dengan cara apapun. Akibatnya adalah mereka dengan hasrat menggebu merantau dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin lalu kembali dengan mengandalkan kekuatan uang untuk merebut posisi sebagai pemimpin. Demokrasi yang memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memilih dan dipilih telah terpola pada sebuah politik yang transaksional yakni politik uang. Situasi ini tentu mengancam dan akan memporak-porandakan bangunan demokrasi kita. Gereja selaku bagian yang berpengaruh sangat besar dalam mengawal demokrasi serta proses suksesi pemimpin dalam masyarakat Toraja seolah-olah tidak berdaya. Kekuatan kapital telah menaklukkan masyarakat termasuk gereja. Tidak adakah jalan lain yang dapat ditempuh gereja? Penelitian ini dilakukan untuk menawarkan konsep rasionalitas komunikasi Jurgen Habermas. Bahwa politik uang yang massif dan sistematis dapat dilawan oleh gereja dengan konsep rasionalitas komunikasi yang massif dan sistematis juga.

Kata Kunci: pemimpin, gereja, politik uang, rasionalitas komunikasi

Article History :

Received: 24-06-2021

Revised: 24-06-2021

Accepted: 25-06-2021

1. Pendahuluan

Pelayanan publik menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka tata kelola kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang dibentuk

oleh negara. Sebuah negara yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya baik tentu memiliki kualitas pelayanan publik yang baik pula. Keberadaan masyarakat menjadi sebuah prasyarat utama pengakuan sebuah negara selain daripada adanya wilayah. Oleh karena itu negara harus menjamin pengelolaan kehidupan masyarakatnya melalui pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik¹. Barang yang dimaksudkan adalah barang publik (*publik goods*) yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat². Tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.³

¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1)

²Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019), 19.

³Ibid

Cerminan ini merupakan parameter yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pencapaian parameter ini besar dipengaruhi oleh mentalitas para pelayan publik, terutama pemimpinnya. Arah kebijakan yang tepat yang diambil oleh pelayan publik akan menentukan tercapainya kepuasan masyarakat.

Uraian tentang defenisi, maksud dan tujuan pelayanan publik ini memberikan gambaran bahwa ada dua unsur penting yang saling terkait yakni pemerintah selaku pelayan dan masyarakat selaku publik yang dilayani. Menurut Lewis and Gilman, pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Dengan demikian dibutuhkan pelayan yang dapat dipercaya oleh masyarakat agar pelayanan publik dapat mencapai tujuannya. Proses pemilihan pelayan publik tentu berperan penting karena proses yang baik akan menghasilkan pelayan publik yang bertanggung jawab. Dalam pembahasan selanjutnya maka pelayan publik ini akan disebut pemimpin.

Setiap daerah tentu memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan secara timbal-balik pun mewujudkan menjadi identitas khas sebuah daerah. Tidak terkecuali Toraja yang memiliki kebudayaan sendiri, memiliki system dan struktur yang memandu masyarakatnya. Setiap bagian dalam system dan struktur masyarakat memiliki latar belakang dan peran masing-masing yang saling memengaruhi. Kemudian terbentuklah kelompok-kelompok sosial. Dari kelompok menciptakan lapisan-lapisan masyarakat yang terbentuk menjadi strata.

Klasifikasi sosial atau strata masyarakat Toraja yang disebut *tana'* menjadi kebiasaan turun temurun dalam masyarakat adat. *Tana'* diartikan sebagai struktur kerja atau kewajiban bagi seseorang yang berada pada lingkup adat⁴. Bagi orang Toraja, urutan *tana'* atau struktur sosial merupakan kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun di dalam masyarakat adat. Tentu hal itu tidak terjadi dengan sendirinya tetapi merupakan konstruksi sosial untuk menjawab berbagai kebutuhan pada saat itu. Susunan masyarakat Toraja umumnya terdiri dari *Tana' Bulaan* (Bangsawan Tinggi), *Tana' Bassi* (Bangsawan Biasa), *Tana' Karurung* (Orang Kebanyakan), dan *Tana' Kua-Kua* (Hamba).⁵

Tana' menjadi sebuah struktur sosial yang begitu melekat bagi orang Toraja. Setiap sendi dan praktek kehidupan masyarakat Toraja sangat terpengaruh pada nilai *tana'*. Hal ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ideal, karena klasifikasi sosial ini adalah dalam rangka pengaturan kehidupan masyarakat. Setiap *tana'* memiliki hak dan

⁴L.T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan* (Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981), 202.

⁵Gereja Toraja, *Benih Yang Tumbuh* 6 (Ende: Percetakan Arnoldus Ende-Flores, 1975), 32.

kewajibkan yang telah diatur sedemikian rupa yang Nampak dalam pelaksanaan ritus kehidupan. Orang Toraja tempo dulu (sebelum Kekristenan datang) melekatkan seluruh kehidupannya dalam ritus *aluk*. Ada dua macam *aluk* yaitu:

1. *Alukna rambu tumuka'* (Upacara kesukaan, pencarian nafkah, pembangunan rumah, perkawinan, dan puncaknya ialah upacara ma'bu'a' pesta kesukaan besar setelah segala pesta-pesta yang lain sudah dilampai).
2. *Alukna rambu sumolo'* (Upacara-upacara kedukaan. Upacara kedukaan, pesta mati yang tertinggi ialah *rapasan sundun*, pesta mati bagi bangsawan-bangsawan).⁶

Awal tahun 1900-an, kolonial Belanda yang menjajah Indonesia kemudian mengirim para zending untuk menyebarkan Injil di berbagai wilayah Indonesia termasuk Toraja. Nilai kekristenan yang dibawa ke Toraja kemudian berjumpa dengan nilai kepercayaan lokal yang telah dihidupi sedemikian lama. Tentu perjumpaan ini memunculkan banyak dialog yang sampai hari ini belum usai. Salah satu tentang stratifikasi sosial masyarakat Toraja. Bagaimanapun juga bahwa kekristenan di Toraja masuk ke dalam sebuah masyarakat yang telah terpola dengan sistem stratifikasi sosial yang sangat kental. Stratifikasi ini melekat dalam seluruh sendi masyarakat dan diri orang Toraja, tidak terkecuali dalam ritual *aluk*. Hal ini memunculkan perdebatan bagi orang Toraja yang telah menjadi kristen. Kekristenan membawa nilai pembebasan, kebebasan dan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Sementara sistem nilai masyarakat Toraja dianggap mengikat dengan kaku. Perjalanan selanjutnya bahwa perlahan orang Toraja meninggalkan sistem nilai yang dulu dihidupi oleh pendahulunya dan menjadi penganut agama Kristen. Akibatnya pun kemudian stratifikasi sosial masyarakat Toraja cenderung menjadi liar. Stratifikasi sosial yang menilai orang berdasarkan garis keturunannya sekarang ditentang dengan kehadiran stratifikasi sosial baru yang menilai orang berdasarkan kekayaannya.⁷

Nilai Kekristenan telah membawa semangat tersendiri bagi kalangan strata sosial yang selama ini merasa tidak diperhitungkan untuk menjadi diperhitungkan. Semangat kesamaan sebagai satu ciptaan di hadapan Tuhan telah dipahami dan dipraktekkan secara liar dalam kehidupan sosial. Semua berlomba dan berjuang untuk berada pada puncak strata sosial untuk mendapatkan prestise, pengakuan dan kedudukan. Pada kondisi ini, orang Toraja cenderung melakukan penguatan ekonomi dengan kepemilikan capital secara besar-besaran dan setelah itu melakukan berbagai upaya untuk

⁶Ibid, 31.

⁷George J. Aditjondro, *Pragmatisme Menjadi To Sugi' Dan To Kapua Di Toraja* (Yogyakarta: CV Gunung Sopai Press,2010), 23.

mengambil kedudukan sosial. Maka orang Toraja rela memotong ratusan kerbau, mengorbankan materi dalam acara *rambu tuka'* atau *rambu solo'* secara tidak rasional hanya untuk mendapatkan pengakuan lalu setelahnya mendapatkan kedudukan sosial.

Situasi perjuangan kelas sosial masyarakat Toraja pun kemudian ditarik dalam ranah suksesi pemimpin masyarakat (pelayan publik). Secara idealnya, pemimpin masyarakat adalah orang yang dipilih untuk mengayomi masyarakat dengan membuat berbagai kebijakan yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Namun idealitas ini menjadi kabur ketika yang terpilih adalah pemimpin yang mengejar prestise dan kedudukan. Model suksesi pemimpin yang terjadi di Toraja hari ini adalah siapa yang punya uang banyak maka dialah yang akan terpilih.⁸ Maka praktek politik uang telah menjadi realitas yang perlahan dianggap sebagai nilai kewajaran. Perjuangan kelas sosial masyarakat Toraja rupanya sangat dipengaruhi oleh kekuatan capital. Situasi ini sangat merusak dan berdampak secara massif. Masyarakat terpola, pelayanan publik menjadi buruk, sistem tatanan masyarakat menjadi rusak, dan berbagai dampak buruk lainnya. Orang Toraja sendiri meyakini bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki empat kriteria yakni *kina* (bijaksana), *manarang* (pintar, memiliki kecerdasan intelegensia), *barani* (berani), *sugi'* (berkecukupan secara ekonomi).

Gereja (dalam konteks ini Gereja Toraja) selaku pengontrol *policy* nilai Kekristenan dalam masyarakat Toraja perlu menemukan jalan untuk memperbaiki situasi ini. Tentu saja Gereja perlu memastikan terlebih dahulu bahwa pelayanan publik juga adalah ranah pelayanan dan misi gereja.

Gereja tentu tidak dapat menyangkali situasi yang terjadi hari ini sebagai salah satu fakta sosial yang sedang berlangsung dan faktual. Fakta sosial merupakan gejala baru dari suatu fenomena yang tidak muncul dari individu, juga tidak dapat direduksi ke tingkat individual, bahkan fakta sosial terdapat di dalam setiap individu, meskipun fakta sosial mungkin tidak segera dapat ditangkap oleh panca indra.⁹ Meskipun kadangkala situasi ini kompleks dan membingungkan, tetapi harus mampu diurai sehingga perlakuan kepadanya menjadi rasional dan komunikatif.

Konsep rasionalitas komunikatif inilah yang telah hilang dalam perjumpaan Gereja dan Kepemimpinan Toraja. Kecenderungan pengabaian gereja pada persoalan

⁸Hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang *kapala dusun* di Toraja Utara. Dalam wawancara ini secara skeptis *kapala dusun* yang diwawancarai berkesimpulan dengan sangat kuat bahwa yang punya uang banyaklah yang akan dipilih masyarakat, yang tidak punya uang jangan coba-coba mempermalukan diri.

⁹Muhamad Supraja, *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 76.

kepemimpinan telah berlangsung cukup lama, disadari atau tidak disadari. Akibatnya adalah pemimpin yang sesungguhnya adalah gereja itu sendiri (dengan demikian pada dirinya melekat fungsi gereja) tidak lagi menjalankan misi mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat. Penekanan dogmatis gereja tentang larangan dan hukuman menjadi menu utama dalam gereja. Rupanya realitas-bertujuan menjadi orientasi utama dan melupakan orientasi timbal balik yang menciptakan komunikasi antara gereja dan warga gereja. Belum lagi kecenderungan gereja yang berfokus pada *ABC (attendance, building, cash)*. Gereja terus bersaing untuk mencari siapa yang paling unggul dari segi jumlah anggota jemaat. Rasanya gedung gereja belum sempurna jika tidak ber dinding beton, memakai jendela dengan kaca ukir, berlantai granit, dan menara megah yang menjulang tinggi ke angkasa. Gereja baru dikatakan mapan ketika bisa menimbun uang dan melaporkan saldo beratus juta rupiah. Gereja semakin sibuk dengan dirinya sendiri. Tanggungjawab sosial gereja dalam konteks menyiapkan dan mengutus gereja menjadi pemimpin kemudian terpinggirkan.

Uraian yang telah disampaikan di atas tentang proses suksesi pelayan publik yang terpatron dalam konsep politik uang harus dikritisi oleh gereja. Untuk itulah teori konsepsi kerja (rasionalitas) dan interaksi (komunikatif) *Jurgen Habermas* dapat digunakan.¹⁰ Penguraian fakta sosial dengan teori *Jurgen Habermas* akan sangat membantu gereja dalam mendapatkan pilihan-pilihan alternatif solusi untuk memperbaikinya. Gereja perlu memperbaiki situasi proses suksesi pemimpin publik untuk tidak terpola pada politik uang yang demikian merusak tatanan masyarakat, tidak hanya secara politik tetapi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan berbagai dimensi hidup manusia lainnya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka serta wawancara konteks di lapangan. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi¹¹. Selanjutnya

¹⁰F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif. Ilmu, Masyarakat, Politik Dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 99.

¹¹Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), 9

pengumpulan data akan dilakukan dengan membaca literatur yang berkaitan langsung dengan penelitian. Selain itu dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak informan yang terkait.

Konsep rasionalitas komunikasi Jurgen Habermas menjadi pisau analisis yang akan dipakai dalam mengupas lebih mendalam fakta sosial yang terjadi. Melalui artikelnya *Technology and Science as Ideology Habermas* secara gamblang menjelaskan perbedaan konsepsi kerja atau tindakan rasional bertujuan (*zweckrational*) dengan tindakan komunikasi (*kommunikativenhandeln*) atau interaksi.¹² Menurutnya, gambaran tentang kerja begitu penting, karena:

Dengan kerja atau tindakan rasional bertujuan, saya memahami tindakan instrumental atau pemilihan rasional atau gabungan keduanya. Tindakan instrumental ditentukan oleh aturan-aturan teknis yang berdasarkan pengetahuan empiris. Di dalam setiap hal aturan-aturan ini menyatakan prediksi-prediksi bersyarat tentang peristiwa-peristiwa fisis atau sosial yang dapat diamati. Prediksi-prediksi ini dapat membuktikan tepat atau keliru. Kelakuan pemilihan rasional ditentukan oleh strategi-strategi yang didasarkan atas pengetahuan analitis. Strategi ini menyatakan secara tidak langsung deduksi-deduksi dari aturan-aturan preferensi (system-sistem nilai) dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan; proposisi-proposisi ini baik dideduksi secara tepat atau keliru. Tindakan rasional bertujuan menentukan tujuan-tujuan dibawah kondisi-kondisi yang telah ada. Tetapi sementara tindakan instrumental mengatur sarana-sarana yang cocok atau tidak cocok menurut kriteria penguasaan efektif atas kenyataan, tindakan strategis tergantung hanya pada evaluasi yang tepat atas pemilihan-pemilihan alternative yang mungkin, yang dihasilkan dari kalkulasi yang ditambahkan oleh nilai-nilai dan norma-norma.¹³

Melalui artikel yang sama Habermas menjelaskan makna interaksi atau komunikasi sebagai berikut:

Dengan 'interaksi'....saya maksudkan tindakan komunikatif, interaksi simbolis. Tindakan komunikatif itu ditentukan oleh norma-norma konsensual yang mengikat, yang menentukan harapan-harapan, timbal balik mengenai tingkah laku dan yang harus dimengerti dan diketahui sekurang-kurangnya oleh dua subyek yang bertindak. Norma-norma sosial diberlakukan lewat sanksi-sanksi. Makna dari norma-norma itu diobyektifkan dalam komunikasi lewat bahasa sehari-hari. Sementara kesahihan aturan-aturan teknis dan strategi-strategi tergantung pada kesahihan proposisi-proposisi yang secara analitis tepat dan secara empiris benar, kesahihan norma-norma sosial didasarkan hanya dalam intersubyektivitas saling pemahaman maksud-maksud dan dinamakan oleh pengetahuan umum mengenai kewajiban-kewajiban.¹⁴

¹²Ibid, 59

¹³Ibid, 60

¹⁴Ibid

3. Hasil dan Pembahasan

Kebudayaan yang tumbuh dan dipedomani dalam masyarakat sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat. Hal ini terkait bahwa dalam kebudayaan terdapat struktur dan system yang memandu kehidupan masyarakat. Sistem dan struktur tatanan masyarakat terus mengalami perkembangan seiring dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh manusia. Sistem dan struktur ciptaan manusia ini menjelma lewat laku dan gerak manusia dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi sebuah kebudayaan. Dengan kebudayaan, manusia menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, yang mau dijadikannya semacam “kerajaannya”.¹⁵ Tujuan pokok kebudayaan dengan ini tidak lain adalah menjadi tempat nyaman bagi berkembangnya manusia sebagai manusia dengan akal dan kebebasannya, berkembang sebagai manusia-manusia unik, pribadi, yang khas dan bukan sebagai gerombolan hewan buas.¹⁶

Kondisi sosial masyarakat Toraja saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Proses ini berjalan dan terpola sebagai dampak dari tindakan manusia. Apa yang terjadi hari ini yang kita sebut fakta sosial hanyalah penampakan dari tindakan manusia yang telah berlangsung cukup lama. Kemiskinan, diskriminasi, kesenjangan sosial, ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan berbagai persoalan lainnya adalah bagian yang mewarnai fenomena fakta sosial hari ini. Situasi ini sangat kompleks dan sepertinya sulit untuk diurai. Berbagai upaya dilakukan oleh *stakeholder* masyarakat, individu maupun kelompok atau lembaga, termasuk gereja.

Kebudayaan masyarakat modern terus berkembang. Hal ini mengakibatkan system tatanan organisasi dalam masyarakat pun terus berkembang. Dalam perkembangan organisasi masyarakat, pemimpin menjadi posisi penting yang akan memberi dampak signifikan bagi perubahan. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat tentu dapat terpecahkan jika pemimpin memiliki tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Bukankah saat ini arah kemajuan negara ditentukan oleh keputusan pemimpin? Kemana negara ini mau dibawa, ditentukan oleh kemana pemimpin mau membawanya.

Gereja memiliki peran yang strategis dalam menentukan pemimpin. Gambaran ideal pemimpin yang diharapkan oleh gereja adalah pemimpin yang melayani (tergambarkan pada diri Yesus Kristus). Tentu ini tidak mudah, karena pada kenyataannya gereja begitu sulit mewujudkannya. Pejabat-pejabat publik yang ada, sebagian besar adalah orang kristen, namun konsep ideal pemimpin yang melayani

¹⁵Mudji Sutrisno, *Membaca RUPA WAJAH Kebudayaan* (Yogyakarta: PT. KANISIUS, 2014), 70.

¹⁶Ibid

masih jauh dari yang diharapkan. Proses rekrutmen dan penentuan pemimpin yang sangat ditentukan oleh politik uang menjadi salah satu kendala utama. Pada kenyataannya hari ini, gereja sepertinya tidak mampu berbuat apa-apa.

Menjadi menarik mengurai fakta dan menawarkan refleksi dan tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh gereja dengan menggunakan teori kritik sosial Habermas. Memahami pemikiran Habermas tidak dapat dipisahkan dari teori yang ada sebelumnya yang telah dipakai untuk melihat fakta-fakta sosial yang terjadi. Kehadiran konsep Refleksi-Komunikatif Habermas menjadi bentuk kritik dari konsep sebelumnya, salah satunya tentang konsep Perjuangan Kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx.

Karl Marx menempatkan ekonomi sebagai penyangga utama dalam bangunan teori kritik sosialnya.¹⁷ Kekuatan kapital menjadi fokus utama yang diinginkan oleh Marx untuk melakukan perubahan sosial. Kapital hanya dapat diwujudkan dengan kerja yang akan memungkinkan setiap individu dapat mewujudkan emansipasi. Ricardo Freedom Nanuru mengutip Supartiningsih dalam bukunya:

Marx berpendapat bahwa manusia adalah makhluk objektif, artinya makhluk yang merealisasikan dirinya dengan mengobjektifikasikan diri ke dalam alam. Pekerjaan adalah tanda manusia sebagai makhluk yang bebas dan universal. Bebas karena manusia tidak hanya melakukan apa yang menjadi kecenderungan naluriahnya. Universal karena manusia dapat mempergunakan seluruh alam menjadi bahan pekerjaan demi tujuan-tujuannya. Kerja adalah tanda martabat manusia. Akan tetapi, yang menjadi dalam kenyataan adalah sebaliknya. Manusia melalui kerja bukannya menemukan kepuasan dan kesenangan, tetapi justru mengalami keterasingan.¹⁸

Lebih lanjut Ricardo Freedom Nanuru mengutip Supartiningsih:

Habermas dalam bukunya *Theory and Practice*, mengemukakan empat macam perkembangan historis yang membuat teori Marx tidak dapat diterima lagi. Perkembangan pertama menyangkut hubungan negara dan ekonomi. Dewasa ini antara keduanya sudah menyatu, tidak seperti jaman Marx. Negara-negara modern saat ini tidak hanya menguasai ekonominya sendiri, tetapi lebih dari itu kehidupan ekonomi menjadi sedemikian mandiri dan menentukan perkembangan negara. Dengan demikian, ekonomi tidak bisa lagi dijadikan sebagai satu-satunya determinan dalam melihat perkembangan masyarakat. Perkembangan kedua menyangkut naiknya standar hidup dari masyarakat maju. Implikasi lebih lanjut dari hal ini adalah operasi yang tidak lagi terbatas pada bidang ekonomi, tapi lebih luas menyangkut psikologi dan etis. Tentu saja keadaan ini pada gilirannya menggeser kepentingan emansipasi proletariat ke dalam kepentingan kelompok-kelompok yang lebih beragam. Hal inilah yang dalam pandangan Habermas dilihat sebagai perkembangan ketiga. Revolusi untuk perubahan sosial dengan demikian memerlukan struktur mekanisme yang lain, yang berbeda

¹⁷F. Budi Hardiman, *ibid*, 79.

¹⁸Ricardo Freedom Nanuru, *Gereja Sosial Menurut Rasionalitas Jürgen Habermas* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2020), 23.

dengan apa yang diusulkan Marx. Habermas mengusulkan mekanisme "refleksi dan komunikasi". Kekuatan alternatif untuk emansipasi harus dicari melalui refleksi dan komunikasi. Akhirnya, perkembangan keempat menyangkut penerapannya di Uni Soviet (yang kini telah gagal). Birokrasi komunisme di Uni Soviet telah memonopoli perkembangan pintas dari negara agraris menjadi negara industri, tetapi tidak menjadi negara tanpa kelas sebagaimana yang diharapkan Marx. Antara negara kapitalis Barat dan komunisme Soviet, pada akhirnya terdapat konvergensi dalam mencita-citakan negara sejahtera. Hal ini tidak berarti bahwa bahaya dehumanisasi tidak dapat dielakkan. Pertarungan politik kedua sistem justru semakin menjauhkan mereka dari upaya emansipasi manusia.¹⁹

Pandangan ini tentu membawa kita pada sebuah pemahaman penting bahwa kemajuan masyarakat tidak dapat dilakukan melalui pendekatan kapital namun lebih dari itu pendekatan yang humanis (refleksi komunikasi). Konsep kemajuan masyarakat yang dimaksud adalah terwujudnya emansipasi manusia dalam masyarakat. Beragamnya masalah kompleks manusia adalah karena ketidakmampuan manusia tersebut untuk mencapai emansipasinya. Untuk mencapai hal ini, maka paradigma sosial yang dikemukakan oleh Habermas melalui refleksi komunikasi dapat ditempuh, secara khusus gereja. Lebih lanjut Nanuru mengutip Supriyadi mengenai bentuk paradigma sosial yang dikembangkan Marx yang dikritisi Habermas dapat dilihat pada table di bawah ini.²⁰

	Paradigma	Pelaku	Aksi	Tujuan
Karl Marx	Kerja	Proletar	Perjuangan Kelas	Penghapusan Kelas
Habermas	Komunikatif	Rasio Manusia	Perbincangan Rasio	Dialog Argumentatif

Perjumpaan Gereja dan Kepemimpinan Toraja Dalam Konsep Rasionalitas Komunikasi Jurgen Habermas

Gereja diutus ke tengah-tengah dunia untuk mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Hal ini berdampak pada sebuah kiniscayaan bahwa gereja tidak dapat menutup mata pada tanggung jawab sosialnya. Dalam kaitan dengan kepemimpinan, Gereja tidak mungkin dapat berdiam diri atas berbagai persoalan sosial yang diakibatkan oleh pemimpin yang buruk.

Sejak Injil pertama kali diperkenalkan di Toraja, sesungguhnya Gereja telah memahami pentingnya kepemimpinan local dalam mewujudkan misi gereja. Hal ini

¹⁹Ibid, 24

²⁰Ibid, 25

sebenarnya disadari oleh *Zending* karena jauh sebelum Injil dibawa, masyarakat Toraja telah hidup dalam sebuah system kepemimpinan yang teratur. Dana Rappoport dalam bukunya mencatat:

Dataran tinggi Toraja mula-mula diserbu oleh pendatang Belanda tahun 1906. Tana Toraja lalu diatur dalam daerah-daerah adat, beberapa diantaranya dinamakan "tempat bernyanyi" (penanian). Tempat-tempat bernyanyi ini merupakan kumpulan beberapa kampung yang berdekatan. Mereka mengikuti aturan-aturan adat dan sebuah kalender ritual bersama. Persatuan mereka dirayakan melalui sebuah pesta untuk kesuburan manusia, binatang, dan tanaman. Pada saat itu dinyanyikan sebuah madah angung (nani). Jadi ungkapan "tempat bernyanyi" sama artinya dengan upacara, dan kemudian daerah-daerah adat. Ungkapan ini merupakan sarana untuk mengatur ruang dan menunjukkan tatanan yang sekaligus bersifat territorial, sosial, agama, dan seni suara. Lalu tahun 1950-an, setelah Belanda angkat kaki, Pemerintah Indonesia membagi daerah tersebut dalam kesatuan-kesatuan administratif baru yang berbeda dari daerah-daerah adat zaman dulu.²¹

Kepemimpinan tradisional Toraja rupanya telah mendapat perhatian yang khusus dari *Zending* Belanda pada awal Injil dibawa ke Toraja. Hal ini sungguh disadari karena kepemimpinan tradisional melekatkan pada kemampuan finansial serta kewibawaan. *Zending* lalu membuat sekolah-sekolah untuk menyekolahkan calon pemimpin yang awalnya bertujuan pada pemberitaan Injil. Calon-calon pemimpin yang disekolahkan di Barana' (Normaalcursus dan Sekolah Guru Injil) diambil dari orang-orang yang mempunyai kepemimpinan tradisional²². Dengan demikian sesungguhnya dari awal, gereja telah menyadari tanggungjawabnya dalam penyiapan pemimpin, meskipun masih dalam dimensi yang terbatas. Pada kondisi ini model rasionalitas sesungguhnya telah berjalan.

Pemikiran atau konsep Habermas tentang rasionalitas sangat terkait dengan konsep rasionalitas Weber.²³ Rasionalitas sebagai ciri tindakan juga mengacu pada perumusan nilai-nilai tertinggi yang mengarahkan tindakan dan orientasi-orientasi terencana secara konsisten dari pencapaian-pencapaian tersebut yang selanjutnya disebut Weber dengan rasionalitas-bertujuan (*zweckrationalität*)²⁴. Konsep ini lalu mendapat kritikan dari Habermas. Menurut Habermas, ada dua dimensi yang berlainan dalam masyarakat yang perlu dirasionalisasikan. Pertama, dimensi yang dibahas Weber, yaitu rasionalitas-bertujuan (meliputi rasionalitas instrument dan strategis). Kedua,

²¹Dana Rappoport, *Nyanyian Tana Diperciki Tiga Darah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 23.

²²Gereja Toraja, *Benih Yang Tumbuh 6* (Ende: Percetakan Arnoldus Ende-Flores, 1975), 36.

²³Ricardo Freedom Nanuru, *ibid*, 36.

²⁴*Ibid*

dimensi yang sebagian besar tidak diperhatikan Weber yaitu yang tercakup dalam komunikasi. Rasionalitas-bertujuan terarah pada pencapaian sukses, sedangkan rasionalitas komunikatif berorientasi pada pemahaman timbal balik.²⁵ Konsekuensinya, Karakter dan kepribadian dibentuk melalui strategi peminatan dan antusiasme sebagai modal yang besar untuk mencapai suatu tujuan. Dengan minat seseorang akan mengomunikasikan sesuatu objek belajar dengan mencurahkan sepenuh-penuhnya kesadaran, tenaga, waktu, peluang dan fasilitas yang dimilikinya demi pencapaian suksesnya.²⁶

Demokrasi yang Sedang Terancam oleh Politik Uang

Tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 adalah membentuk Pemerintah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pemerintah Negara yang dibentuk untuk tujuan mulia ini dipilih oleh rakyat dengan cara yang demokratis. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menjadi landasan dalam pemilihan pemimpin yang disebut dalam konstitusi sebagai Pemerintah Negara.

Dalam masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun berkuasa, system pembangunan Indonesia tersentralisasi di pemerintah pusat. Ketika Orde Baru ditumbangkan dan ditandai dengan lahirnya semangat reformasi, maka system ini pun digugat dan melahirkan system otonomi daerah. Proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung hingga empat kali telah memperkuat system otonomi daerah pada konsep desentralisasi dengan memperkuat wewenang pemerintah daerah dalam upaya pembangunan nasional.

Penguatan wewenang pemerintah daerah oleh undang-undang rupanya telah mendorong masyarakat untuk berlomba mendudukinya melalui proses suksesi, baik di legislatif maupun eksekutif. Demokrasi memungkinkan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Pemerintahan negara yang ada di daerah telah dipahami sebagai wilayah kekuasaan untuk memperoleh tidak hanya kekuasaan tetapi juga gengsi dan pengakuan dalam masyarakat. Situasi ini mendorong kontestasi politik sebagai ajang berebut kekuasaan. Segala cara dihalalkan termasuk politik uang.

²⁵Ibid, 37.

²⁶Rannu Sanderan, *Exemplary: Menemukan Kunci Pendidikan Iman Bagi Anak Dalam Keluarga Dan Pembelajaran Agama Di Sekolah* (Tana Toraja: STAKN Toraja, 2016).

Undang-Undang No. 10 tahun 2016 merumuskan politik uang sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Secara tegas dalam undang-undang ini mengatur apa saja sanksi terhadap perbuatan politik uang. Namun pada kenyataannya, praktek ini merajalela dalam masyarakat dan dianggap sebagai bagian dari strategi pemenangan. Politik transaksional perlahan telah merusak bangunan demokrasi yang telah dirancang sedemikian baiknya. Pada konteks pemilihan kepala daerah, politik uang telah memberi beban yang berat dan menyandera pemerintahan daerah. Akibatnya masyarakat dirugikan dan pembangunan di daerah menjadi tidak lagi maksimal.

Rasionalitas komunikasi perlu dibangun dalam persoalan ini. Berangkat dari pertanyaan apakah memang kontestasi politik itu dalam rangka perebutan kekuasaan dan pengakuan saja ataukah dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat? Tentu komunikasi perlu dibangun secara timbal balik, antara pemimpin dan masyarakat. Jika pola ini berjalan, tentu demokrasi di Indonesia akan berkembang dengan pesat. Gereja dapat berperan dan membangun konsep ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Gereja

Telah cukup lama gereja terus berdebat tentang apa yang sebaiknya dilakukan dalam persoalan sosial masyarakat. Secara khusus pemimpin yang menjadi salah satu instrument penting dalam masyarakat. Gereja sepertinya lupa untuk mengutus warganya kesana. Gereja juga tidak melakukan upaya mengintervensi secara positif proses suksesi pemimpin melalui jalan komunikatif. Akhirnya pemimpin menghalalkan segala cara, berorientasi hanya pada kekuasaan dan masyarakat menjadi korban. Sampai disini apakah kita dapat mengatakan gereja telah turut dalam mendukung sistem kepemimpinan yang buruk? Problem karakter dan integritas manusia merupakan medan pelayanan gereja. Maka gereja bertanggungjawab untuk mendorong terjadinya perubahan pandangan dalam hal ini untuk suksesi kepemimpinan tidak mesti berorientasi pada pengendalian uang atau materi. Tetapi gereja seharusnya menekankan proses pembentukan karakter dan integritas diri melalui proses pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran yang justru lebih bernilai dari materi (spirit protestantisme). Gereja dapat meletakkan karakter dasar kepemimpinan melalui media budaya, dengan membangun prinsip dan integritas kekristenan.²⁷

²⁷Rannu Sanderan, "Heuristika dalam Pendidikan Karakter Manusia Toraja Tradisional," *BIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 3, no. 2 (December 19, 2020): 306–27, <https://doi.org/10.34307/b.v3i2.213>.

Gereja dalam menjalankan misi di tengah-tengah dunia tidak boleh terkurung dalam persoalan dogma. Pemahaman misi tidak lagi dipahami sebagai upaya untuk mencari jiwa tetapi lebih luas daripada itu.²⁸ Perhatian pada lingkungan hidup, perbaikan sosial ekonomi, serta mereka yang tersingkir dan dirampok, seharusnya menjadi bagian dari misi Allah yang harus dilakukan oleh orang percaya²⁹. Misi Allah datang ke dunia melalui Yesus Kristus dan ditampakkan dalam seluruh kehidupan dan pelayanan Yesus³⁰. Dia memberi makan pada yang lapar, menyembuhkan orang buta dan lumpuh, membangkitkan orang mati, serta membela perempuan yang akan dirajam³¹. Misi Allah bukan sekedar membawa manusia dibaptis dalam gereja, tetapi mewujudkan tanda-tanda kedatangan pemerintahan Allah atau *Basilea* di tengah dunia.³²

4. Kesimpulan

Konteks pemimpin dalam masyarakat Toraja tentu menjadi bagian yang harus diseriuisi oleh gereja, karena kekuatan sosial gereja besar ada pada mereka. Disinilah salah satu kunci peran politik yang semestinya dilakukan oleh gereja untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia. Pemimpin adalah “gereja yang tersembunyi” yang justru memiliki peran yang vital dan konkrit. Falsafah Pemimpin dalam masyarakat Toraja adalah Pemimpin sebagai *Parandangan* yang artinya sebagai asas, aturan, yang mengarahkan kepada keteraturan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta manusia dan alam semesta (seluruh ciptaan).³³ Bukankah dengan ini maka gereja akan lebih mampu berbuat banyak?

Konsep Rasionalitas komunikatif Habermas dapat dipakai dan dikembangkan oleh gereja. Modal sosial yang dimiliki oleh gereja sesungguhnya sangatlah kuat untuk turut berperan dalam melakukan perubahan sosial. Pola yang dikembangkan oleh gereja haruslah sistematis dan tentu saja komunikatif. Penguatan gereja sebagai calon pemimpin maupun pemimpin semestinya dilakukan dengan pertama, mengisi mereka dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk memimpin (kosep pemimpin Toraja yakni *kina, manarang, barani, sugi*). Kedua, membangun komunikasi yang tidak berhenti untuk proses timbal balik antara pemimpin dan masyarakat. Dengan jalan ini, maka

²⁸Osef P. Wdyatmadja, *Yesus Dan Wong Cilik* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 10.

²⁹Ibid

³⁰Ibid

³¹Ibid

³²Ibid

³³Wawancara dilakukan kepada Hendry Parimba, seorang yang secara aktif menggeluti budaya Toraja bersama Pong Barumbun yang telah lebih dikenal oleh orang Toraja pada umumnya.

proses penyadaran dapat dilakukan, sehingga setiap orang yang hendak atau telah menjadi pemimpin tidak berorientasi hanya pada kekuasaan lalu menghalalkan segala cara termasuk politik uang. Maka gereja akan mampu mendorong pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang dikerjakan oleh pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Referensi

- Aditjondro, George J. *Pragmatisme Menjadi To Sugi' Dan To Kapua Di Toraja*. Yogyakarta: CV Gunung Sopai Press, 2010.
- Gereja Toraja. *Benih Yang Tumbuh 6*. Ende: Percetakan Arnoldus Ende-Flores, 1975.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hardiman, F. Budi. *Menuju Masyarakat Komunikatif. Ilmu, Masyarakat, Politik Dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Parimba, Hendry, wawancara oleh Penulis, Toraja, Indonesia, 8 Maret 2021.
- Nanuru, Ricardo Freedom. *Gereja Sosial Menurut Rasionalitas Jurgen Habermas*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2020.,
- Rappoport, Dana. *Nyanyian Tana Diperciki Tiga Darah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Ridwan, Juniarso. Sudrajat, Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019.
- Salmon, wawancara oleh Penulis, Toraja, Indonesia, 22 Mei 2021.
- Sanderan, Rannu. *Exemplary, Menemukan Kunci Pendidikan Iman Bagi Anak Dalam Keluarga Dan Pembelajaran Agama Di Sekolah*. Tana Toraja: STAKN Toraja, 2016.
- Sanderan, Rannu. "Heuristika dalam Pendidikan Karakter Manusia Toraja Tradisional," *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 3, no. 2 (December 19, 2020): 306–27.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2011.
- Supraja, Muhamad. *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Sutrisno, Mudji. *Membaca RUPA WAJAH Kebudayaan*. Yogyakarta: PT. KANISIUS, 2014.
- Tangdilintin L.T. *Toraja dan Kebudayaan*. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan (YALBU), 1981.
- Widyatmadja, Josef P. *Yesus Dan Wong Cilik*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.